

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Barat, yang dibentuk pada tahun 2004, merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia yang terdiri dari 6 Kabupaten yaitu : Mamuju, Majene, Polewali, Mamasa, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Sebagai daerah yang sedang berkembang, Sulawesi Barat memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam dan manusia.

Perlu diketahui bahwa sektor pajak dan retribusi daerah di Sulawesi Barat masih belum optimal, baik dari segi penggalan potensi maupun tingkat kepatuhan masyarakat. Kurangnya sistem yang efektif untuk memungut pajak dan retribusi, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban fiskal, menjadi hambatan utama. Selain itu, Sulawesi Barat memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata. Namun, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PAD masih rendah akibat lemahnya infrastruktur, kurangnya investasi, dan rendahnya nilai tambah dari produk-produk unggulan daerah. Mengalami keadaan ini yang membuat tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Per kapita dan Investasi terhadap PAD di Provinsi Sulawesi Barat.

Hendaknya dari penelitian ini pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan strategis yang berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lain yang sah. Hal ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan



Sulawesi Barat memiliki tantangan geografis, seperti kondisi alam yang

berbukit-bukit dan infrastruktur yang terbatas. Hal ini menghambat aksesibilitas untuk pengembangan ekonomi, termasuk pengumpulan pajak dan retribusi daerah dari wilayah terpencil. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD telah dilakukan melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta peningkatan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan dukungan yang lebih luas, baik dari segi regulasi, infrastruktur, maupun partisipasi masyarakat.

Ke depan, penguatan PAD di Provinsi Sulawesi Barat membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup pengembangan sektor-sektor unggulan, diversifikasi sumber pendapatan, serta perbaikan kualitas pelayanan publik untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, Provinsi Sulawesi Barat dapat meningkatkan kemandirian fiskalnya dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 2023).

Jumlah penduduk merupakan faktor penting dalam perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya. Sulawesi Barat, sebagai provinsi yang relatif baru, mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Hal ini membawa peluang sekaligus tantangan dalam hal penyediaan lapangan kerja dan pelayanan publik. Sebaran penduduk di Sulawesi Barat tidak merata, kabupaten Polewali Mandar memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu sekitar 495.371 jiwa pada pertengahan tahun 2023, yang merupakan sekitar 33% dari total penduduk provinsi. Sementara itu, Kabupaten Mamasa memiliki jumlah penduduk terkecil, dengan estimasi sekitar 170.354 jiwa pada periode yang sama.



Tabel 1. 1 Kepadatan Penduduk setiap Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

Polewali Mandar	495.371	33%
Mamuju	319.876	22%
Majene	177.934	12%
Mamasa	170.354	12%
Mamuju Tengah	161.543	11%
Pasangkayu	156.999	10%
Total	1.481.077	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat dan Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023.

Kepadatan penduduk di Sulawesi Barat juga bervariasi antar kabupaten. Secara keseluruhan, provinsi ini memiliki kepadatan rata-rata sekitar 86 jiwa per kilometer persegi. Namun, beberapa kabupaten memiliki kepadatan yang lebih tinggi, terutama di daerah perkotaan.

Pendapatan per kapita merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Di Sulawesi Barat, pendapatan per kapita telah mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi provinsi ini. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan pendapatan antar wilayah. Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat mencatat bahwa pendapatan per kapita provinsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala BPS Sulawesi Barat: "Meskipun terjadi peningkatan pendapatan per kapita, kami masih perlu bekerja keras untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar kabupaten di Sulawesi Barat. Upaya pemerataan pendapatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas



Investasi merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Di Sulawesi Barat, investasi telah menjadi fokus utama pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan menjadi tujuan utama investasi di provinsi ini. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di Sulawesi Barat menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan pernyataan Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, yang menyatakan: "Kami terus berupaya meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Sulawesi Barat. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan dukungan infrastruktur yang terus ditingkatkan, kami yakin Sulawesi Barat akan menjadi tujuan investasi yang menarik di masa depan."

Ketiga variabel ini investasi, pendapatan per kapita, dan jumlah penduduk saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks pembangunan Sulawesi Barat. Dalam upaya menyeimbangkan ketiga variabel tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, diharapkan Sulawesi Barat dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Tabel 1. 2 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah di Indonesia

1.	Sumatera Barat	2,78 (Triliun Rupiah)
2.	Sulawesi Barat	2,04 (Triliun Rupiah)
3.	Sumatera Selatan	5,20 (Triliun Rupiah)

: Badan Pusat Statistika Indonesia 2023.

dasarakan data BPS menunjukkan tiga provinsi dengan Pendapatan Asli (PAD) terendah di Indonesia pada tahun 2023. Di urutan kedua dalam



daftar ini adalah Provinsi Sulawesi Barat dengan PAD sebesar Rp. 2,04 triliun. Posisi ini menempatkan Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi dengan pendapatan asli daerah yang masih rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Tabel 1. 3 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Anggaran/Pagu	821,89 M	854,25	888,01 M	905,69 M	1.010,64 M
Realisasi	773,57 M	807,73 M	904,08 M	847,65 M	851,55 M
%	94.12	94.55	101.81	93.59	84.26

Data dari : Portal Data SIKD, Provinsi Sulawesi Barat 2019-2023.

Bisa kita lihat dari Tabel PAD di Sulawesi Barat pada 5 tahun terakhir, hanya pada tahun 2021 Realisasi dari target anggaran melampaui hingga selisih 16,07 M. Tapi pada tahun 2022 hingga 2023 Realisasi dari target Anggaran PAD Sulawesi Barat kembali menurun sama seperti pada tahun 2019 hingga 2020 Bahkan Realisasi turun sampai 10% dari tahun 2019 ke tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi, pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber lokal seperti pajak daerah, retribusi, dan lain - lain masih rendah. Ini bisa mencerminkan adanya tantangan struktural atau efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah yang menghambat peningkatan PAD, meskipun ekonomi secara umum berkembang. Disparitas ini menyoroti perlunya fokus pada peningkatan basis pendapatan lokal dan efisiensi fiskal untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan menjadi tan kesejahteraan dan pembangunan daerah yang lebih merata.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Apakah Pendapatan Perkapita berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Barat ?
3. Apakah Investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Barat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Per kapita terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian yang relevan dimasa yang akan datang.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

Jumlah penduduk, Pendapatan Per kapita dan investasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sari & Saskara, 2022). Jumlah penduduk yang seimbang menyediakan tenaga kerja dan pasar yang cukup. Pendapatan Perkapita yang terkendali menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, Investasi yang efisien meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas. Interaksi antara ketiga faktor ini harus dikelola dengan baik untuk mencapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Teori penerimaan pemerintah, konsep ekonomi yang menjelaskan bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Penerimaan pemerintah umumnya berasal dari beberapa sumber utama, dan teori-teori terkait membantu memahami dinamika dan optimalisasi penerimaan tersebut. Sumber Penerimaan Pemerintah

1. Pajak

- a. Pajak adalah sumber utama penerimaan pemerintah. Ini meliputi pajak langsung (seperti pajak penghasilan dan pajak kekayaan) dan pajak tidak langsung (seperti pajak pertambahan nilai/PPN dan bea cukai).
- b. Teori Pajak Optimal: Teori ini menjelaskan bagaimana struktur pajak dirancang untuk memaksimalkan penerimaan tanpa merugikan perekonomian atau masyarakat secara signifikan.



2. Penerimaan Non-Pajak

- a. Penerimaan dari sumber lain seperti dividen BUMN, royalti sumber daya alam, retribusi, dan denda administratif.

3. Pinjaman Pemerintah

- a. Pemerintah dapat meminjam, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk menutup defisit anggaran.

4. Donasi atau Hibah

- a. Hibah dari lembaga internasional atau negara lain sebagai bentuk bantuan pembangunan.

Undang-Undang Pemerintah Daerah Untuk Provinsi Sulawesi Barat, beberapa regulasi utama meliputi Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

1. Mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
2. Menjelaskan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi
3. Mengatur mekanisme pembagian urusan pemerintahan

Menurut model Leviathan, penerapan tarif pajak yang lebih tinggi secara teori tidak selalu menghasilkan penerimaan total yang maksimal. Hal ini bergantung pada respons wajib pajak serta dinamika permintaan dan penawaran barang yang dikenai pajak lebih tinggi. Oleh karena itu, teori ini sebaiknya menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pendapatan pajak daerah, tanpa selalu mengandalkan kenaikan tarif pajak untuk mencapai penerimaan maksimal. Penerimaan daerah adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah



dana Perimbangan, dan sumber pendapatan lain yang sah. Teori ini berada konsep desentralisasi fiskal yang bertujuan memberikan otonomi

kepada daerah untuk mengelola sumber dayanya sendiri (Brodjonegoro, 2004).

Undang-Undang Pemerintah Daerah Untuk Provinsi Sulawesi Barat, beberapa regulasi utama meliputi Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

4. Mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
5. Menjelaskan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi
6. Mengatur mekanisme pembagian urusan pemerintahan

2.1.2. Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau yang mengurangi jumlah penduduk (Safitri & Aliasuddin, 2016). Pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti dengan kualitas yang baik dan kurang dalam modal, teknologi yang masih sederhana, tenaga kerja ahli yang masih kurang, serta tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk dianggap sebagai hambatan dalam pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Oleh karenanya dilakukan upaya yang kuat untuk meningkatkan pemertaan pendapatan penduduk antara lain dengan membuka peluang kerja yang diciptakan oleh pemerintah maupun swasta. (Rochaida, 2016). Faktor penduduk menjadi suatu indikator penting dalam mempersiapkan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan upaya pemerintah melakukan pengembangan kepada masyarakat yang realitanya penduduk sebagai salah satu tujuan utama dalam proses pencapaian suatu pembangunan, hasil pembangunan tersebut didapatkan dari pendapatan daerah. Artinya, semakin bertambahnya penduduk maka jumlah tenaga kerja akan mengalami peningkatan sehingga

akan jumlah produksi bertambah. Sehingga pertumbuhan penduduk berdampak dalam memastikan tingkatan produksi terhadap pendapatan



asli daerah (Ramdani, Darmansyah, & Ahmar, 2021).

Dalam Teori Demografis jumlah penduduk terdapat Teori Malthusian menjelaskan populasi yang besar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika ada sumber daya yang mencukupi, tetapi jika tidak, bisa membebani daerah. Dalam konteks PAD, populasi yang besar dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi, namun juga memerlukan pengeluaran besar untuk pelayanan publik (Dr. Rahmad Budi Suharto, 2020).

Secara konseptual, jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli. Hal ini dapat dijelaskan melalui berbagai mekanisme, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana penambahan penduduk menciptakan potensi ekonomi yang lebih besar bagi daerah.

Dalam perspektif teoritis, beberapa teori ekonomi klasik dan modern mendukung hubungan positif antara jumlah penduduk dan PAD. Teori Pendapatan Keynes menekankan peran konsumsi agregat dalam menggerakkan ekonomi, dimana jumlah penduduk yang lebih besar berpotensi menciptakan permintaan yang lebih tinggi dan menghasilkan multiplier effect pada perekonomian daerah. Sementara itu, Teori Pertumbuhan Penduduk yang dikemukakan Malthus, meskipun sering dikaitkan dengan dampak negatif pertumbuhan populasi, juga mengakui bahwa penambahan penduduk mendorong inovasi dan produktivitas.

Berbagai penelitian empiris telah memvalidasi hubungan positif antara jumlah penduduk dan PAD. Studi yang dilakukan Santosa dan Rahayu (2005) di Jawa Timur menunjukkan korelasi positif dengan elastisitas PAD terhadap penduduk

1,89. Penelitian Purwanto (2013) di Surakarta mengungkapkan kontribusi jumlah penduduk terhadap variasi PAD sebesar 42,7%. Temuan serupa



juga dihasilkan oleh Nugroho dan Rohman (2012) dalam studinya di Jawa Tengah, yang menegaskan pengaruh positif jumlah penduduk terhadap PAD dengan urbanisasi sebagai faktor pendukung penting.

Meskipun demikian, hubungan positif antara jumlah penduduk dan PAD tidak terjadi secara otomatis. Diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan potensi penduduk dalam meningkatkan PAD. Hal ini mencakup perencanaan kependudukan yang baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Aspek tata kelola pemerintahan juga memegang peran krusial, termasuk reformasi birokrasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hubungan antara jumlah penduduk dan PAD perlu dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penambahan penduduk dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan PAD. Namun di sisi lain, pertumbuhan tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara upaya peningkatan PAD dan penjagaan kualitas hidup masyarakat.

2.1.3. Pendapatan Perkapita

Dalam definisi konseptual pendapatan perkapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima setiap individu dalam suatu wilayah selama periode tertentu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Hubungan Struktural diantaranya, Kontribusi Langsung Pendapatan per kapita mempengaruhi PAD melalui :



ampuan masyarakat membayar pajak
nsi retribusi daerah

3. Kontribusi sektor usaha lokal
4. Daya beli masyarakat yang mendorong aktivitas ekonomi

Pendapatan per kapita bukanlah sekadar angka statistik, melainkan refleksi dinamika ekonomi yang kompleks. Ia menjadi instrumen strategis dalam mengukur, memahami, dan mengembangkan potensi ekonomi daerah (Oktavina, 2012). Peningkatan aktivitas ekonomi ini pada gilirannya menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi bagi pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi daerah. Lebih jauh lagi, pendapatan per kapita yang tinggi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor usaha dan investasi.

Teori Kapasitas Fiskal (Fiscal Capacity Theory) menjelaskan bahwa kapasitas fiskal suatu daerah tergantung pada basis pajak yang tersedia, yang berbanding lurus dengan pendapatan per kapita penduduk. Ketika pendapatan per kapita meningkat antara lain, Kemampuan penduduk untuk membayar pajak, retribusi, dan kontribusi ekonomi lainnya juga meningkat selain itu, Pendapatan daerah dari sumber-sumber seperti Pajak Daerah (PBB, pajak kendaraan bermotor) ikut bertambah (Andersson, 2023).

2.1.4. Investasi

Dalam konteks ekonomi, istilah investasi telah menjadi umum dan sering diartikan sebagai tindakan menanamkan uang dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Menurut Teori Ekonomi Regional: Investasi menciptakan efek multiplier dalam suatu wilayah, seperti pembangunan infrastruktur yang menarik lebih banyak investor dan meningkatkan kegiatan lokal (Dr. Arniati, 2022).



Investasi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-

perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2011).

Investasi, baik dalam bentuk investasi domestik maupun asing, dapat memacu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lokal seperti industri, pariwisata, pertanian, dan jasa. Ketika investasi meningkat, produksi barang dan jasa juga meningkat, yang berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi. Hal ini kemudian mempengaruhi pendapatan masyarakat dan perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dari pajak daerah, retribusi, dan sumber-sumber pendapatan asli lainnya.

Teori yang mendukung pengaruh positif investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah Teori Keynes. Dalam konteks Pendapatan Asli Daerah (PAD), teori Keynes dapat memberikan wawasan tentang bagaimana investasi publik dan swasta dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Menurut teori Keynes, investasi adalah salah satu komponen utama dari permintaan agregat. Ketika pemerintah atau sektor swasta melakukan investasi, baik dalam infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan, hal ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong konsumsi, yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan agregat. Dengan meningkatnya permintaan, sektor-sektor ekonomi akan tumbuh, dan ini dapat menghasilkan peningkatan dalam PAD. Penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya hubungan positif antara investasi dan peningkatan PAD. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2017) menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara tingkat investasi dan pertumbuhan PAD. Studi ini

menunjukkan bahwa peningkatan investasi sebesar 1% dapat meningkatkan PAD 0.5%. Penelitian dari Thodaro, dkk (2014) tentang Pengaruh Belanja



Modal, Investasi, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah juga menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan investasi terhadap penerimaan PAD. Penelitian Anggraini dan studi-studi lainnya telah menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara investasi dan peningkatan PAD.

2.1.5. Jumlah Penduduk Kaitannya terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut teori Malthusian, Thomas Malthus berpendapat bahwa jumlah penduduk yang bertambah pesat tanpa diimbangi pertumbuhan sumber daya ekonomi dapat membebani kapasitas daerah. Ini bisa menjadi tantangan dalam meningkatkan PAD jika penduduk lebih banyak bergantung pada pelayanan publik daripada berkontribusi terhadap perekonomian daerah (Pieris, 2015).

2.1.6. Pendapatan Perkapita Kaitannya terhadap Pendapatan Asli Daerah

Teori Kapasitas Fiskal (Fiscal Capacity Theory) menjelaskan bahwa kapasitas fiskal suatu daerah tergantung pada basis pajak yang tersedia, yang berbanding lurus dengan pendapatan per kapita penduduk. Ketika pendapatan per kapita meningkat antara lain, Kemampuan penduduk untuk membayar pajak, retribusi, dan kontribusi ekonomi lainnya juga meningkat selain itu, Pendapatan daerah dari sumber-sumber seperti Pajak Daerah (PBB, pajak kendaraan bermotor) ikut bertambah (Andersson, 2023).

2.1.7. Investasi Kaitannya terhadap Pendapatan Asli Daerah

Teori Pertumbuhan Endogen (Endogenous Growth Theory) Teori ini menyatakan bahwa investasi, terutama dalam modal fisik dan infrastruktur, dapat memberikan efek langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks PAD: Investasi meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, sehingga menghasilkan basis pajak yang lebih besar. Pajak dari aktivitas bisnis (seperti



pajak hotel, restoran, dan hiburan) serta retribusi penggunaan aset daerah langsung berkontribusi pada PAD (Mutmainah, Disman, & Kurniawati, 2021) .

2.2. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan variabel penelitian saya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulisan tesis ini antara lain :

Pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Aceh). Metode yang dipakai Path Analysis untuk menguji pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dan juga variabel intervening (Z). Koefisien jalur dari Path Analysis tersebut dilihat pada Standardized Coefficient dari Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil dari penelitian ini Investasi berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah kabupaten di Provinsi Aceh, Investasi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kemampuan daerah membiayai belanja pegawai pada pemerintah kabupaten di Provinsi Aceh (Ifrizal, Dr. Darwanis, & Dr. Sulaiman, 2020).

Pengaruh sektor pariwisata, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Investasi dan Jumlah Penduduk terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang dipakai adalah *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel sektor pariwisata tidak berpengaruh terhadap



an asli daerah, Sedangkan variabel produk domestik regional bruto
aruh terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian pada variabel tingkat
berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya jumlah

penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Kamila, 2016).

Pengaruh PDRB, Investasi, dan Jumlah penduduk terhadap Pendapatan asli daerah. Metode *Purposive Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh terhadap PAD, sementara Investasi tidak berpengaruh, dan Jumlah Penduduk juga tidak berpengaruh terhadap PAD. Penelitian ini mengakui keterbatasan, yaitu ketidaknormalan data yang memerlukan penghilangan outlier untuk normalisasi data (Nashruddin & witono, 2024).

Pengaruh pendapatan perkapita, pajak daerah dan jumlah perusahaan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten nduga tahun 2009 -2018. Metode analisis data menggunakan alat analisis regresi linier berganda, dengan melakukan hipotesa dan asumsi klasik untuk memperoleh fungsi linier yang terbaik dan parameter tidak bias Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS for Windows ver.16 dengan tingkat kemaknaan untuk menolak hipotesis nol adalah $< 0,05$ untuk setiap uji statistik. hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan per kapita, jumlah penerimaan pajak daerah, dan jumlah perusahaan tidak memiliki pengaruh, baik secara sendiri-sendiri ataupun parsial maupun secara bersama-sama atau simultan terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nduga Provinsi Papua (Nimiange, Engka, & Kawung, 2021).

Pengaruh Investasi PMA/PMDN dan Jumlah penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Metode yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Untuk tujuan analisis

n data sekunder berupa data time series 1984-2005. Hasil dari penelitian
1 tingkat korelasi variabel PMA, PMDN, dan Jumlah Penduduk tersebut
akan adaya hubungan yang signifikan secara simultan (keseluruhan)



sebesar 96,1%. Kemudian koefisien determinasi sebesar 92,4% yang menunjukkan bahwa variabel-variabel independen (PMA, PMDN, Jumlah Penduduk) yang digunakan dapat menjelaskan model sebesar 92,4% terhadap PDRB sedangkan sisanya sebesar 7,6% adalah dari variabel independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini (Julifiansyah, 2013).

Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. Metode yang digunakan alat analisis Regresi Linear Berganda, dengan persamaan double logaritma, Penelitian ini berorientasi kepada analisis data sekunder dengan data time series periode 1991-2006. Hasil penelitian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan Jumlah Penduduk mempunyai hubungan negatif dan pengaruhnya tidak signifikan secara parsial terhadap PAD Kabupaten Merangin selama periode 1991/2006. Tetapi secara bersama-sama kedua variabel tersebut pengaruhnya adalah signifikan. PDRB dan jumlah penduduk mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan PAD dan model yang diestimasi adalah tepat (Adriani & Handayani, 2008).

